



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 68 TAHUN 2016

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah serta meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah Kabupaten Dharmasraya dilakukan melalui penetapan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pelaksanaan tujuan dan sasaran yang dicapai;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Dharmasraya

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
- 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 244) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80)
7. Peraturan Menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Dharmasraya Nomor 63).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
4. Perangkat Daerah adalah unit kerja/ lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja serta Kecamatan sesuai dengan kebutuhan daerah.
5. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.
6. Sasaran (target) adalah adslah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan
7. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
8. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
9. Keluaran (outpout) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan. ↗

10. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dan kegiatan-kegiatan dalam satu program.
11. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan.
12. Indikator Kinerja Program adalah ukuran atas hasil (outcome) dari suatu program yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah.
13. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.
14. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBN/APBD).
15. Perjanjian Kinerja adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.
16. Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/ target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.
17. Instansi pemerintah adalah unsur penyelenggara pemerintah pusat atau unsur penyelenggara pemerintah daerah. 

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Penetapan Indikator Kinerja Utama bertujuan :

- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
- b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja

BAB III
INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 3

Untuk mengukur keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran pemerintah daerah ditetapkan Indikator Kinerja Utama pemerintah daerah.

Pasal 4

- (1) Indikator Kinerja Utama pemerintah daerah sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) berdasarkan Indikator Kinerja Utama pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perangkat daerah menetapkan Indikator Kinerja Utama perangkat daerah dengan keputusan kepala perangkat daerah.
- (3) Indikator Kinerja Utama perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penjabaran dari Indikator Kinerja Utama pemerintah daerah.

Pasal 5

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah digunakan oleh perangkat daerah untuk :

- a. Perencanaan jangka menengah;
- b. Perencanaan tahunan
- c. Penyusunan dokumen perjanjian kinerja
- d. Pelaporan kinerja
- e. Evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
- f. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

BAB IV
PEMBINAAN, KOORDINASI DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh bagian yang membidangi organisasi pada Sekretariat Daerah
- (2) Koordinasi atas dokumen perencanaan kinerja setiap perangkat daerah terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan.
- (3) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang pengawasan

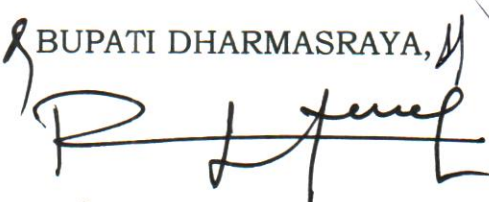
BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

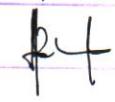
Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 28 Desember 2016

BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKa

Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 28 Desember 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM,


LELI ARNI, S.Pd, M.Si

LEGAL DRAFTING TELANCI	
OLEH BAGIAN HUKUM & CDD	
SETDA/KAD. DHARMASRAYA	
TANGGAL	TANDA TANGGAL
	
	

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2016 NOMOR 68

Lampiran : Peraturan Bupati Dharmasraya
Nomor : 68 Tahun 2016
Tanggal : 28 Desember 2016
Tentang : Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Dharmasraya

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA**

VISI : MENUJU DHARMASRAYA MANDIRI DAN BERBUDAYA

MISI :

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui peningkatan kesehatan, kecakapan, keahlian, sikap dan moralitas sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, inovasi dan keharmonisan masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah sebagai pelayanan dasar daerah secara merata dan sumber kemajuan ekonomi.
3. Mengelola kekayaan sumber daya alam pertanian, pertambangan, peternakan, perikanan dan pariwisata secara optimal dan bernilai tambah besar mensejahterakan masyarakat.
4. Memelihara kualitas lingkungan Kabupaten Dharmasraya untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang andal dan maju sehingga mampu membangun berbagai potensi daerah. ✓
6. Memberdayakan nagari dan kelompok masyarakat sebagai pelaku pembangunan dalam bidang sosial dan ekonomi. ✓
7. Menegakkan kehidupan beragama, beradat dan berbudaya sebagai norma sosial dan semangat membangun ✓

TUJUAN :

1. Peningkatan Kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan
2. Peningkatan Kualitas dan pemerataan pendidikan
3. Penyiapan dan penyaluran tenaga kerja terlatih
4. Peningkatan kesejahteraan sosial
5. Revitalisasi kawasan pasar dan pasar nagari
6. Membangun ruang publik untuk masyarakat
7. Peningkatan konektivitas permukiman dan ekonomi masyarakat
8. Peningkatan penyediaan Air Minum
9. Penyediaan perumahan dan lingkungan yang sehat
10. Mewujudkan ketahanan pangan

- 15.Peningkatan kinerja penataan ruang daerah
- 16.Penghijauan lahan kritis
- 17.Pelestarian keanekaragaman hayati
- 18.Pengendalian pencemaran lingkungan
- 19.Penangguangan bencana
- 20.Pencegahan dan pemberantasan korupsi
- 21.Memantapkan sistem pembangunan daerah
- 22.Pembangunan sistem informasi pembangunan daerah
- 23.Membangun basis data pembangunan nagari dan kecamatan
- 24.Membangun BUM Nagari
- 25.Melakukan pembangunan berbasis nagari
- 26.Meningkatkan peran adat dan kehidupan beragama
- 27.Adanya pengelolaan khazanah dan warisan budaya Dharmasraya untuk memperkuat identitas Kabupaten Dharmasraya

No.	SASARAN	Indikator	Satuan	Penjelasan/ Definisi	Penanggung Jawab	Sumber Data
1.	Meningkatnya akses kesehatan	Rasio posyandu per satuan balita (per 1000 balita)	Perseribu balita	$rumus = \frac{Jumlah\ Posyandu}{Jumlah\ balita} \times 1000$	Perangkat daerah yang menangani bidang kesehatan	Perangkat daerah yang menangani bidang kesehatan
		Rasio puskesmas, klinik, poliklinik, pustu per satuan penduduk	Perseribu penduduk	$rumus = \frac{Jumlah\ Puskesmas, klinik, pustu}{Jumlah\ penduduk} \times 1000$		
		cakupan akses /jangkauan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	Memudahkan dan pemerataan jangkauan masyarakat untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan		
		Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Persen	Tercapainya imunisasi dasar secara lengkap pada bayi (0-11 bulan), ibu hamil, wanita usia subur dan anak sekolah tingkat dasar		
		Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	Persen	Persentase balita yang mengalami gizi buruk yang mendapat perawatan		

No.	SASARAN	Indikator	Satuan	Penjelasan/ Definisi	Penanggung Jawab	Sumber Data
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	Persen	Persentase penemuan kasus disertai penanganan terhadap penderita penyakit TBC BTA		
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	Persen	Persentase penemuan kasus disertai penanganan terhadap penderita penyakit DBD		
		Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	Persen	Persentase pasien masyarakat miskin yang mendapat pelayanan kesehatan rujukan		
2.	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Angka kematian bayi (AKB)	Perseribu kelahiran hidup	Angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu	Perangkat daerah yang menangani bidang kesehatan	Perangkat daerah yang menangani bidang kesehatan
		Angka Kematian Ibu melahirkan (AKI)	Per 100.000 Kelahiran hidup	Banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain, per 100.000 kelahiran hidup		
		Akaba	Per seribu Jumlah balita	Jumlah kematian anak berusia 0-4 tahun selama satu tahun tertentu per 1.000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun itu (termasuk kematian bayi)		
		Angka usia harapan hidup	Tahun	rata-rata kesempatan atau waktu hidup yang tersisa. Usia harapan hidup dapat diartikan pula dengan banyaknya tahun yang ditempuh penduduk yang masih hidup sampai umur tertentu		
		Persentase balita gizi buruk	Persen	Balita gizi buruk atau malnutrisi adalah suatu bentuk terparah akibat kurang gizi menahun		

13

No.	SASARAN	Indikator	Satuan	Penjelasan/ Definisi	Penanggung Jawab	Sumber Data
3.	Meningkatkan kesiagaan pelayanan kesehatan	Persentase Ibu Hamil mendapat pelayanan antenatal /K4	Persen	Pemeriksaan kehamilan yang diberikan oleh bidan atau dokter kepada ibu selama masa kehamilan untuk mengoptimalkan kesehatan mental dan fisik ibu hamil	Perangkat daerah yang menangani bidang kesehatan	Perangkat daerah yang menangani bidang kesehatan
		Persentase Ibu Nifas yang mendapatkan pelayanan (KF)	Persen	Jumlah kontak ibu hamil dengan tenaga kesehatan ke-4 (atau lebih) baik di dalam maupun di luar gedung Puskesmas (Posyandu, Polindes, Kunjungan rumah, Rumah Sakit dan praktek swasta di wilayah kerja puskesmas) untuk mendapatkan pelayanan antenatal sesuai dengan standar yang ditetapkan minimal (5T)		
		Persentase kunjungan neonatal lengkap (KN Lengkap)	Persen	Jumlah neonatal yang mendapatkan pelayanan sesuai standar 3 kali (KN1, KN2, KN3),		
		Persentase neonatal komplikasi yang ditangani	Persen	Jumlah ibu nifas yang mengalami risiko tinggi/ komplikasi dan dapat ditangani/ dilayani di pelayanan dasar dan rujukan		
4.	Meningkatkan kegiatan olahraga masyarakat	Jumlah cabang olah raga yang dibina	Cabang	Banyaknya cabang olah raga yang dibina pemerintah daerah	Perangkat daerah yang menangani bidang Pendidikan	Perangkat daerah yang menangani bidang pendidikan
5.	Meratanya akses pendidikan	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	Jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Untuk menghitung Rata-rata Lama Sekolah dibutuhkan informasi: a. Partisipasi sekolah b. Jenjang dan jenis pendidikan yang pernah/sedang diduduki c. Ijasah tertinggi yang dimiliki d. Tingkat/kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki	Perangkat daerah yang menangani bidang Pendidikan	BPS

No.	SASARAN	Indikator	Satuan	Penjelasan/ Definisi	Penanggung Jawab	
		APK PAUD	Tahun	Proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu.		
		APK SD/MI/Paket A	Tahun			
		APK SMP/MTs/Paket B	Tahun			
		APM SD/MI	Tahun	Proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut		
		APM SMP/MTs	Tahun			
6.	Terwujudnya pendidikan yang bermutu melalui standarisasi sekolah dan pengelolaan pendidikan yang transparan dan akuntabel	Persentase ruang kelas pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	Persen	Persentase sekolah yang memiliki gedung dalam kondisi baik	Perangkat daerah yang menangani bidang Pendidikan	Perangkat daerah yang menangani bidang Pendidikan
		Persentase ruang kelas pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	Persen			
		Jumlah yang terakreditasi A SD	Unit	kegiatan penilaian yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang. untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non-formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan		
		Jumlah yang terakreditasi A SMP	Unit			
		Jumlah SD Melaksanakan Pendidikan Karakter	Unit	Sekolah yang menerapkan pola pendidikan yang menekankan pada hal sifat-sifat psikologis, tingkah laku atau budi pekerti yang menjadi ciri khas seseorang		
7.	Meningkatnya minat baca dan budaya membaca	Jumlah perpustakaan daerah	Unit	Menunjukkan jumlah perpustakaan tingkat kabupaten yang dikelola oleh pemerintah kabupaten	Perangkat daerah yang menangani bidang Perpustakaan	Perangkat daerah yang menangani bidang Perpustakaan
		Jumlah Perpustakaan Binaan	Unit	Jumlah perpustakaan yang dibina pemerintah kabupaten		
		Jumlah pengunjung perpustakaan	Orang	Jumlah pengunjung perpustakaan dalam periode tertentu		
		Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Buku	Jumlah buku yang tersedia di perpustakaan daerah		
8.	Meningkatnya program pendidikan keagamaan	Jumlah Lembaga Didikan Subuh yang terbina dan terlatih	Unit	Jumlah lembaga didikan subuh yang aktif	Perangkat daerah yang menangani bidang pendidikan	Perangkat daerah yang menangani bidang pendidikan
		Jumlah SD, SLTP, dan SLTA yang mengikuti Pesantren Ramadhan	Unit	Jumlah sekolah yang melaksanakan pesantren ramadhan		

No.	SASARAN	Indikator	Satuan	Penjelasan/ Definisi	Penanggung Jawab	Sumber Data
9.	Meningkatnya tingkat pendidikan	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	Persen	Persentase siswa tingkat tertinggi pada jenjang sekolah tertentu yang dinyatakan lulus	Perangkat daerah yang menangani bidang pendidikan	Perangkat daerah yang menangani bidang pendidikan
		Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	Persen			
10	Peningkatan fungsi balai latihan kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	Suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survei	Perangkat daerah yang menangani bidang tenaga kerja	BPS
		Persentase pencari kerja yang ditempatkan	Persen	Menunjukkan persentase pencari kerja yang mendaftar dan ditempatkan		
11	Penyelenggaraan pelatihan dan penyaluran tenaga kerja pemuda nagari	Jumlah pendidikan dan keterampilan yang diajarkan	Kegiatan	Bertujuan untuk mengurangi tingkat pengangguran di nagari	Perangkat daerah yang menangani bidang tenaga kerja	Perangkat daerah yang menangani bidang tenaga kerja
12	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Persen	Meningkatkan perempuan dalam segala bidang serta menyediakan lingkungan ramah anak (layak anak)	Perangkat daerah yang menangani bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Perangkat daerah yang menangani bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
		cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang terselesaikan penanganannya pada unit pelayanan terpadu	Persen			
13	Tertanganinya permasalahan sosial masyarakat	Jumlah panti asuhan yang dibina	unit	Jumlah panti asuhan yang dibina pemerintah kabupaten	Perangkat daerah yang menangani bidang sosial	Perangkat daerah yang menangani bidang sosial
		Jumlah Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan PMKS lainnya yang terbantu	jiwa	Menunjukkan jumlah Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan PMKS lainnya yang dibantu pemerintah kabupaten		
14	Revitalisasi kawasan pasar Sungai Rumbai, Koto Baru, Pulau Punjung.	Jumlah kawasan pasar yang direhabilitasi	unit	Rahabilitasi kawasan pasar (pasar pulau punjung, pasar Koto Baru, dan pasar Sungai Rumbai)	Perangkat daerah yang menangani bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah	Perangkat daerah yang menangani bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah

No.	SASARAN	Indikator	Satuan	Penjelasan/ Definisi	Penanggung Jawab	Sumber Data
15	Revitalisasi los kios pasar nagari	Persentase pasar dalam kondisi baik	persen	Menunjukkan proporsi pasar yang kondusif sebagai media perdagangan	Perangkat daerah yang menangani bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah	Perangkat daerah yang menangani bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah
16	Tersedianya Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai tempat rekreasi dan interaksi penduduk	Luas RTH yang terbangun	Ha	RTH merupakan area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam	Perangkat daerah yang menangani bidang pekerjaan umum dan penataan ruang	Perangkat daerah yang menangani bidang pekerjaan umum dan penataan ruang
		Jumlah kelompok dalam pengelolaan RTH	kelompok			
17	Berkembangnya kawasan dan objek wisata utama kabupaten	Jumlah Destinasi wisata	Lokasi	Menunjukkan jumlah lokasi destinasi wisata	Perangkat daerah yang menangani pariwisata	Perangkat daerah yang menangani pariwisata
		jumlah kawasan wisata yang dikembangkan	Kawasan	Jumlah kawasan wisata yang dikembangkan sebagai objek wisata		
		Jumlah event wisata yang dilaksanakan	event	Event wisata yang diadakan dalam kurun waktu tertentu		
18	Lancarnya akses antar permukiman dan terbebasnya penduduk dari keterisoliran	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap	Persen	Menunjukkan proporsi jalan yang berkondisi baik terhadap panjang jalan keseluruhan	Perangkat daerah yang menangani bidang pekerjaan umum dan penataan ruang	Perangkat daerah yang menangani bidang pekerjaan umum dan penataan ruang
19	Akses yang lancar membawa hasil bumi ke pasar	Panjang pembangunan jalan produksi perkebunan (km)	Km	Merupakan prasarana transportasi guna mendukung sub sektor perkebunan	Perangkat daerah yang menangani bidang pertanian	Perangkat daerah yang menangani bidang pertanian
		Panjang jalan usaha tani (JUT)	Km	JUT merupakan prasarana transportasi pada kawasan pertanian (tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan) untuk memperlancar mobilitas alat dan mesin pertanian,	Perangkat daerah yang menangani bidang pertanian	Perangkat daerah yang menangani bidang pertanian
20	Peningkatan dan perluasan wilayah pelayanan Penyediaan air minum perpipaan	Rumah tangga pengguna air bersih	Rt	jumlah rumah tangga terlayani air bersih dibagi jumlah rumah tangga se Kabupaten Dharmasraya	Perangkat daerah yang menangani pekerjaan umum dan penataan ruang	Perangkat daerah yang menangani pekerjaan umum dan penataan ruang

19

No.	SASARAN	Indikator	Satuan	Penjelasan/ Definisi	Penanggung Jawab	Sumber Data
21	Optimalisasi dan peningkatan pelayanan persampahan	Cakupan Pelayanan Persampahan	Persen	$\frac{\text{tingkat pengelolaan sampah}}{\text{jumlah timbunan sampah}} \times 100$	Perangkat daerah yang menangani pekerjaan umum dan penataan ruang	Perangkat daerah yang menangani pekerjaan umum dan penataan ruang
22	Peningkatan sanitasi rumah dan perbaikan lingkungan	rasio rumah tangga bersanitasi baik	Persen	menghitung cakupan sanitasi dan mengurangi daerah genangan	Perangkat daerah yang menangani pekerjaan umum dan penataan ruang	Perangkat daerah yang menangani pekerjaan umum dan penataan ruang
23	Peningkatan penyediaan perumahan bagi masyarakat miskin	Rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu	Unit	Tersedianya rumah layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah	Perangkat daerah yang menangani pekerjaan umum dan penataan ruang	Perangkat daerah yang menangani pekerjaan umum dan penataan ruang
24	Meningkatnya ketersediaan pangan, keamanan pangan, keterjangkauan pangan, dan pemanfaatan pangan	Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita	persen	Ketentuan mengenai pangan mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian No.65/Permentan/Ot.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sedangkan definisi ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau	Perangkat daerah yang menangani bidang pangan	BPS
		Penguatan Cadangan Pangan	persen			
		Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah	Persen			
		Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan	persen			
		Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	persen			
		produksi padi	Ton	Meningkatkan produksi padi melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sawah	Perangkat daerah yang menangani bidang pertanian	
25	Meningkatkan produksi dan produktifitas ternak	populasi sapi	Ekor	Jumlah populasi sapi kabupaten	Perangkat daerah yang menangani bidang pertanian	Perangkat daerah yang menangani bidang pertanian
		populasi ayam potong	Ekor	Jumlah populasi ayam potong kabupaten		
26	Meningkatkan produksi perikanan	Produksi perikanan	Ton	Jumlah produksi ikan kabupaten	Perangkat daerah yang menangani bidang kelautan dan perikanan	Perangkat daerah yang menangani bidang kelautan dan perikanan

No.	SASARAN	Indikator	Satuan	Penjelasan/ Definisi	Penanggung Jawab	Sumber Data
27	Peningkatan nilai tambah hasil pertanian	NTP	Persen	perbandingan indeks harga yang diterima petani (It) dengan indeks harga yang dibayar petani (Ib). Semakin tinggi NTP, mencerminkan semakin sejahteranya para petani	Perangkat daerah yang menangani bidang pertanian	BPS
		kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	Persen	Persentase peran sektor pertanian dibandingkan dengan total seluruh sektor PDRB kabupaten	Perangkat daerah yang menangani bidang pertanian	BPS
28	Meningkatnya diversifikasi budidaya pertanian	jumlah tanaman hortikultura yang dibudidayakan	Jenis	-	Perangkat daerah yang menangani bidang pertanian	Perangkat daerah yang menangani pertanian
		Jumlah kelompok /ekor pada integrasi sapi-sawit	kelompok	-		
29	Meningkatnya intensifikasi budidaya pertanian	produktivitas padi	Ton/ha	Jumlah produksi padi perhektar yang dihasilkan dalam setiap kali panen	Perangkat daerah yang menangani bidang pertanian	BPS
30	Meningkatnya nilai produksi industri	Jumlah IKM terlatih	Kelompok	Hal ini dilakukan untuk peningkatan daya saing IKM untuk dapat meningkatkan daya saing	Perangkat daerah yang menangani bidang perindustrian	Perangkat daerah yang menangani bidang perindustrian
		Jumlah produk memiliki merk	Jenis			
		Jumlah produk berlabel halal	Jenis			
31	Meningkatnya kegiatan ekonomi perdagangan rakyat disektor perdagangan eceran dan perdagangan komoditi	Cakupan binaan pedagang	Persen	Jumlah pedagang yang dibina/ diberi bantuan dan pelatihan	Perangkat daerah yang menangani bidang perdagangan	Perangkat daerah yang menangani bidang perdagangan
		Pertumbuhan omzet pedagang pasar berkondisi baik yang telah direvitalisasi	Persen	Menunjukkan perkembangan volume usaha yang dilakukan oleh pedagang pasar untuk periode tertentu		
32	Tersedianya pedoman pemanfaatan dan pengendalian ruang kabupaten	Jumlah dokumen tata ruang (RTRW, RDTR, dan zoning regulation)	dok	Jumlah dokumen penataan ruang yang dihasilkan dan ditetapkan yang terdiri dari RTRW, RDTR, dan zoning regulation	Perangkat daerah yang menangani bidang pekerjaan umum dan penataan ruang	Perangkat daerah yang menangani bidang pekerjaan umum dan penataan ruang
33	Aparatur pemerintah daerah yang semakin kompeten dalam penyelenggaraan penataan ruang daerah	Jumlah PNS yang dilatih sebagai penilik penataan ruang	Orang	Sebagai pengendali pemanfaatan ruang di daerah	Perangkat daerah yang menangani bidang pekerjaan umum dan penataan ruang	Perangkat daerah yang menangani bidang pekerjaan umum dan penataan ruang

No.	SASARAN	Indikator	Satuan	Penjelasan/ Definisi	Penanggung Jawab	Sumber Data
34	Berkurangnya lahan kritis	Jumlah kawasan SDA yang dikonservasi dan dilindungi	Kawasan	Lahan kritis adalah lahan yang tidak produktif. Lahan kritis bersifat tandus, gundul, dan tidak dapat digunakan untuk usaha pertanian, karena tingkat kesuburannya sangat rendah.	Perangkat daerah yang menangani bidang lingkungan hidup	Perangkat daerah yang menangani bidang lingkungan hidup
35	Tertanganinya flora dan fauna yang terancam kepunahan	Cakupan Wilayah Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem	Persen	Melindungi flora dan fauna yang terancam dari kepunahan	Perangkat daerah yang menangani bidang lingkungan hidup	Perangkat daerah yang menangani bidang lingkungan hidup
36	Berkurangnya dampak pencemaran pada DAS Batang Hari	Cakupan Koordinasi dan implementasi Program/ kegiatan rencana aksi penanganan permasalahan LH di DAS Batanghari	Persen	Pengendalian kegiatan dan perijinan untuk mencegah penyimpangan pemanfaatan ruang di DAS Batanghari	Perangkat daerah yang menangani bidang lingkungan hidup	Perangkat daerah yang menangani bidang lingkungan hidup
37	Peningkatan tanggap bencana	Tingkat Pelayanan Pencegahan Bahaya Kebakaran	persen	Bertujuan untuk mewujudkan kesiapan, kesigapan, dan keberdayaan masyarakat, pengelola bangunan gedung, serta instansi terkait dalam mencegah, dan menanggulangi bahaya kebakaran	Perangkat daerah yang menangani bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	Perangkat daerah yang menangani bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
		Tingkat pelayanan penanggulangan bencana alam	Persen	Dasar undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Bertujuan dalam pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam		
		Tingkat Penanganan dan Rekonstruksi pasca bencana alam	Persen	Bertujuan untuk peningkatan koordinasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan rehabilitasi dan rekonsruksi kerusakan akibat bencana		
		Tingkat waktu tanggap (response time rate)	menit	Menuju penanganan kejadian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya		
38	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas dari praktek korupsi	Persentase peningkatan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan dan Prosentase terselesaikannya kasus pengaduan dan kasus PNS opini BPK terhadap laporan keuangan	persen	Menunjukkan persentase hasil temuan yang ditindaklanjuti	Perangkat daerah yang menangani bidang pengawasan	Perangkat daerah yang menangani bidang pengawasan
			WTP/WDP /disclaimer	Penilaian BPK terhadap laporan keuangan daerah	Perangkat daerah yang menangani bidang pengelolaan keuangan	Perangkat daerah yang menangani bidang pengelolaan keuangan

No.	SASARAN	Indikator	Satuan	Penjelasan/ Definisi	Penanggung Jawab	Sumber Data
39	Peningkatan Profesionalitas aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan kedinasan	Orang	Menunjukkan jumlah ASN yang dilatih guna peningkatan kecakapan dan kualitas ASN	Perangkat daerah yang menangani bidang kepegawaian	Perangkat daerah yang menangani bidang kepegawaian
40	Peningkatan kinerja pelaksanaan tahapan pembangunan daerah	persentase penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD	persen	Menunjukkan persentase program RPJMD yang direncanakan/dilaksanakan pada tahun rencana	Perangkat daerah yang menangani bidang perencanaan	Perangkat daerah yang menangani bidang perencanaan
		Persentase konsistensi perencanaan dan penganggaran tahunan	Persen	menunjukkan kesesuaian program/kegiatan RKPD terhadap penganggaran di tahun rencana	Perangkat daerah yang menangani bidang perencanaan	Perangkat daerah yang menangani bidang perencanaan
41	Terbentuknya unit pengumpulan dan pengolahan data pembangunan	pembentukan unit pengumpulan dan pengolahan data pembangunan lintas SKPD	Unit	Terbentuknya tim yang bertugas dalam pengolahan dan pengumpulan data secara terintegrasi	Perangkat daerah yang menangani bidang statistik	Perangkat daerah yang menangani bidang statistik
42	Terbangunnya data pembangunan terintegrasi dalam sistem informasi	Jumlah perangkat daerah yang memiliki website/ e-government yang terintegrasi	PD	menunjukkan jumlah perangkat daerah yang sudah memiliki website guna menjalankan keterbukaan informais publik dan sosialisasi tingkat perangkat daerah	Perangkat daerah yang menangani bidang komunikasi dan informatika	Perangkat daerah yang menangani bidang komunikasi dan informatika
43	Sinkronnya basis data nagari dan kecamatan	Terlaksananya Nagari berbasis sistem data (IT)	nagari	menunjukkan jumlah nagari yang sudah memiliki dan mengupdate website nagari secara aktif	Perangkat daerah yang menangani bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, dan bidang statistik	Perangkat daerah yang menangani bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, dan bidang statistik
44	Adanya BUM Nagari	Jumlah Badan Usaha Nagari (BUMNag)	unit	Menghitung jumlah BUM nagari yang sudah terbentuk	Perangkat daerah yang menangani bidang pemberdayaan masyarakat dan desa	Perangkat daerah yang menangani bidang pemberdayaan masyarakat dan desa

No.	SASARAN	Indikator	Satuan	Penjelasan/ Definisi	Penanggung Jawab	Sumber Data
45	Adanya standar sistem pembangunan nagari di Kabupaten Dharmasraya yang siap menghadapi tantangan masa depan	LPM Berprestasi	Unit	Melihat perkembangan organisasi/ kelompok masyarakat terlibat aktif dalam pembangunan	Perangkat daerah yang menangani bidang pemberdayaan masyarakat dan desa	Perangkat daerah yang menangani bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
		PKK aktif	Unit			
		Posyandu aktif	Unit			
		Persentase kelompok masyarakat nagari yang terlibat aktif dalam pembangunan nagari	persen			
46	Meningkatnya kehidupan beragama	Jumlah Lembaga Didikan Subuh yang terbina dan terlatih	Unit	Jumlah lembaga didikan subuh yang terbentuk	Perangkat daerah yang menangani bidang pendidikan	Perangkat daerah yang menangani bidang pendidikan
		Jumlah SD/MI dan SMP/MTs yang mengikuti Pesantren Ramadhan	unit	Jumlah sekolah yang melibatkan siswa dalam pesantren ramadhan	Perangkat daerah yang menangani bidang pendidikan	Perangkat daerah yang menangani bidang pendidikan
47	Meningkatkan peran adat	Jumlah Lembaga adat yang dikembangkan	unit	Adanya kelembagaan adat di tingkat nagari dan kabupaten yang dikembangkan	Perangkat daerah yang menangani bidang kebudayaan	Perangkat daerah yang menangani bidang kebudayaan
48	Adanya pelestarian warisan budaya Dharmasraya	Terbentuknya tim ahli cagar budaya;		Pengembangan bidang kebudayaan dikembangkan karena Dharmasraya memiliki sejarah budaya dan adanya masyarakat yang multietnis. Pelestarian warisan budaya mencakup : 1. Perlindungan warisan budaya 2. Pengembangan warisan budaya, dan 3. Pemanfaatan warisan budaya	Perangkat daerah yang menangani bidang kebudayaan	Perangkat daerah yang menangani bidang kebudayaan
		Inventarisasi warisan budaya;				
		Kegiatan penelitian warisan budaya.				
		Ketersediaan sarana dan prasarana wisata sejarah				
		Revitalisasi rumah gadang/kerajaan menjadi museum insitusi;				
		Ketersediaan sarana dan prasarana perpustakaan khasanah dan warisan budaya				

No.	SASARAN	Indikator	Satuan	Penjelasan/ Definisi	Penanggung Jawab	Sumber Data
49	Terkelolanya khazanah dan warisan budaya Dharmasraya	Dokumen kerja sama dengan BPCB, BPNB, BALAR dan perguruan tinggi untuk pengelolaan khazanah budaya;		Pengelolaan khazanah budaya diimplemenmtasikan dalam bentuk penyusunan dokumen, sosialisasi/seminar dan berbagai event budaya, hal ini bertujuan untuk : 1. revitalisasi budaya di Dharmasraya 2. apresiasi budaya 3. promosi budaya	Perangkat daerah yang menangani bidang kebudayaan	Perangkat daerah yang menangani bidang kebudayaan
		jumlah rumah gadang yang di revitalisasi (pulau punjung, sungai dareh, padang laweh, koto besar, siguntur)			Perangkat daerah yang menangani bidang kebudayaan	Perangkat daerah yang menangani bidang kebudayaan
		Jumlah festival budaya Dharmasraya;				
		Jumlah promosi budaya Kabupaten Dharmasraya;				
		Jumlah seminar budaya Dharmasraya				

BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKA

